

Pengaruh Pembangunan Daerah Melalui Community Development (Comdev) UPPKS Terhadap Kemiskinan Di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang

Anita Maharani, Dr.Hj.Humaidah Muafiqie,Se,M.Si
Magister Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana
Universitas Darul 'Ulum Jombang

ABSTRACT

Community Development (comdev/community development) is an effort to develop a community condition in a sustainable and active manner based on the principles of social justice and mutual respect. Community workers seek to facilitate citizens in the process of creating social justice and mutual respect through broad development programs that connect all components of society. Community development translates the values of openness, equality, responsibility, opportunity, choice, participation, mutual benefit, and continuous learning. The essence of community development is educating, enabling community members to do something by providing the necessary strength or advice and empowering them. The objectives to be achieved in this study are: to determine the effect of regional development on poverty alleviation efforts through the UPPKS Comdev program in Ngoro District, Jombang Regency. The approach in this research is descriptive quantitative, with multiple regression analysis. With the results of the study: That there is a significant influence on regional development on poverty alleviation efforts in Ngoro District, Jombang Regency. That there is no significant effect of Comdev UPPKS on poverty alleviation in Ngoro District, Jombang Regency. The lack of influence of the UPPKS Comdev program in Ngoro District, Jombang Regency is caused by aspects of increasing insight and knowledge; aspects of implementing leadership styles as well as aspects of providing capital assistance and the lack of ATTG (Appropriate Technology Tools) assistance received.

Keywords : Regional Development, Community Development, Poverty

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur kondisi sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah di suatu daerah. Banyak dampak negatif yang dihasilkan dari kemiskinan, antara lain menimbulkan masalah sosial dan ekonomi (Saputra dalam Khadijah, dkk, 2017).

Pada Sensus Penduduk Tahun 2016, dari 551.896 keluarga di Kabupaten Jombang terdapat penduduk pra sejahtera atau miskin sebanyak 71.421 keluarga atau 8% keluarga (BPS Kab. Jombang 2018). Kecamatan Ngoro merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Jombang dengan luas 49,86 km², dengan jumlah penduduk 65.587 jiwa, dan kepadatan 1.315 jiwa/km² dan terdiri dari 13 desa. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Jombang, keluarga pra sejahtera masyarakat Kecamatan Ngoro berjumlah 4.362 keluarga atau menduduki peringkat ke enam adanya kemiskinan di wilayah Kabupaten Jombang.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yaitu dengan pembangunan yang berbasis pengembangan masyarakat atau dalam istilah lain disebut sebagai community development atau sering disingkat CD atau *Comdev*. *Comdev* adalah sebagai upaya mengintegrasikan sistem pembangunan partisipatif ke dalam sistem perencanaan

pembangunan reguler, dirancang untuk mendorong dan menguatkan inisiatif daerah dalam melaksanakan program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kondisi, karakteristik, kekhususan dan kebutuhan daerah. Salah satu program Comdev adalah UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera), program UPPKS sendiri dikelola oleh BKKBN. Di dalam pelaksanaannya program UPPKS yang juga merupakan salah satu program pemberdayaan keluarga yang sasaran utamanya adalah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I untuk itulah perlu diterapkan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat yang diharapkan dapat membantu anggota kelompok.

Dwi Pratiwi Kurniawati dalam kajian tentang pemberdayaan masyarakat di bidang usaha ekonomi menemukan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mojokerto khususnya pada sektor ekonomi yakni berupa bantuan individu dan bantuan kelembagaan belum sepenuhnya berhasil, dominasi dalam pelaksanaan oleh pihak pemerintah daerah membuat program tidak berjalan secara maksimal (Kurniawati, Supriyono, & Hanafi, 2013). Sementara itu, Faizatul Karimah dalam kajiannya mengenai pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat menunjukkan secara administrasi dan fungsional pengelolaan alokasi dana desa dijalankan dengan baik, namun secara aplikatif terlihat belum sampai pada makna pemberdayaan masyarakat sesungguhnya (Karimah, Saleh, & Wanusmawatie, 2005). Isnan Murdiansyah menunjukkan beberapa permasalahan dalam menjalankan program gerakan pendukung pengentasan kemiskinan Kabupaten Malang seperti kurangnya modal, adanya pemotongan dana, kredit yang macet, dominasi aparat desa, dukungan infrastruktur desa yang masih rendah, dan juga koordinasi di antara pengelola program gerakan pendukung pengentasan kemiskinan di kabupaten belum maksimal (Amalia, dkk, 2014). Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui pengaruh pembangunan daerah terhadap upaya pengentasan kemiskinan melalui program Comdev UPPKS di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, berdasarkan maksud dan tujuan penulis dalam memperoleh data dengan penelitian studi kasus. Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dengan 13 Desa dengan sampel 104 orang.cara memperoleh data dengan Studi Lapangan (*Field Research*) dan Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Variabel Independen : Pembangunan Daerah (X1) dan Community Development UPPKS (X2) sedangkan Variabel Dependen adalah Kemiskinan (Y). Data di peroleh dari kuesioner pembangunan daerah, kemiskinan dan Comdev UPPKS. Kuesioner menggunakan skala tipe Likert. Analisis ini dibantu dengan bantuan software SPSS 21, dengan ketentuan uji F pada Alpha = 0,05 atau $p \leq 0,05$ sebagai taraf signifikansi F (sig. F) dan uji t taraf signifikansi Alpha = 0,05 atau $p \leq 0,05$ dengan analisis regresi berganda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Ngoro

Kecamatan Ngoro terletak di $7^{\circ} 38' 0''$ LS s/d $7^{\circ} 44' 0''$ LS dan $112^{\circ} 13' 0''$ BT s/d $112^{\circ} 18' 0''$ BT. Kecamatan Ngoro memiliki 13 desa, antara lain Ngoro, Kauman, Rejoagung, Kesamben, Kertorejo, Sugihwaras, Gajah, Banyuarang, Badang, Pulorejo, Genukwatu, Sidowarek, dan Jombok. Kecamatan Ngoro di sebelah Utara dibatasi oleh Kecamatan Mojowarno, di sebelah Selatan dibatasi Kabupaten Kediri, di sebelah Timur dibatasi oleh

Kecamatan Bareng, dan di sebelah Barat dibatasi oleh Kecamatan Gudo. Kecamatan Ngoro merupakan salah satu wilayah yang didominasi pertanian. Selain itu Kecamatan Ngoro adalah kecamatan yang dilalui jalan provinsi yang menghubungkan Jombang dengan Pare (Kediri) dan Malang.

Adapun jumlah Agen dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Ngoro adalah 5.355 dari jumlah penduduk sebesar 76.299. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya dalam pegawai swasta, pertanian dan peringkat ke 3 adalah wiraswasta.

2. Pembangunan Daerah Kecamatan Ngoro

Kecamatan Ngoro dalam pembangunan daerahnya melalui musrembang telah mengajukan anggaran pembangunan untuk tahun 2019, sebagai berikut:

Tabel 1
Anggaran Kecamatan Ngoro 2019

Program Kerja	Anggaran (rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
Pelayanan Administrasi Perkantoran	249.694.000	99.969.925	24,97
Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	204.389.500	46.430.000	44,02
Peningkatan Disiplin Aparatur	21.900.000	0	0
Rencana Strategis dan Pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	11.870.000	6.432.000	18,45
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	1.967.855.000	614.334.737	32,03
Total	2.455.708.500	767.166.662	32,01

Sumber : Kantor Kecamatan Ngoro 2019

Sehingga total anggaran Rencana Kerja SKPD Kecamatan Ngoro tahun 2018 adalah Rp.2.458.563.500,- (Dua milyar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 adalah Rp.767.166.662,- atau 32,01%

Sebagaimana juga fungsinya kecamatan adalah sebagai pengawas dan pembina pembangunan dan perpanjangan tangan Bupati Kepala Pemerintahan daerah, maka secara fungsional kecamatan dalam hal ini camat juga bertanggungjawab dengan dana yang diterima oleh desa melalui Pemerintahan Pusat ataupun Daerah Adapun dan desa yang diterima oleh Desa di Wilayah Kecamatan Ngoro adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Dana Desa Untuk Keperuntukan Menurut Sumber Biaya Dan Desa/Kelurahan di Wilayah Kecamatan Ngoro Tahun 2019

A. Sumber Dana Pemerintah Pusat

No	Kegiatan	Jumlah Desa	Jumlah Dana Rp
1	Kegiatan Proyek Dan Kegiatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	16	155.397.542.268

2	Kegiatan Posyandu	16	4.746.000
3	Kegiatan PKK	16	7.680.000
4	Kegiatan LPMD	16	1.344.000
5	Kegiatan Karang Taruna	16	960.000
6	Kegiatan Linmas	16	2.304.000
7	Kegiatan GSI	16	576.000
8	Kegiatan Lembaga Seni Tradisional	16	576.000
9	Kegiatan Sambung Rasa	16	960.000
10	Kegiatan Honor TPQ	16	1.056.000
11	Kegiatan Jumantik	16	576.000
Jumlah		16	155.418.320.268

Sumber: PMD Kecamatan Ngoro

B. Sumber Dana Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang

No	Kegiatan	Jumlah Desa	Jumlah Dana Rp
1	Kegiatan Proyek dan Kegiatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	16	6.048.889.312
2	Kegiatan Bop dan Tunjangan BPD	16	256.000
3	Untuk Intensif RT / RW	16	307.200
4	Untuk Penjaga Makam	16	2.487.420
5	Untuk Majelis Taklim	16	192.000
Jumlah		16	6.051.568.732

Sumber: PMD Kecamatan Ngoro

Dari anggaran yang terealisasi untuk pembangunan, statistik kondisi Keluarga Pra Sejahtera, Sejahtera I dan Sejahtera III di Kecamatan Ngoro yang terkover dalam BPS Kabupaten Jombang sebagai berikut:

Tabel 2
Banyaknya Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera
Kecamatan Ngoro menurut Klasifikasi BKKBN

Tahun	Pra Sejahtera	Sejahtera I	Sejahtera III	Jumlah
2015	4362	5465	10924	20751
2016	4362	5465	10924	20751
2017	4362	5465	10924	20751
2018	4310	5515	11047	20872

Sumber : Olah data PLKB Kecamatan Ngoro

Pada tahun 2015 sampai pada tahun 2017, kondisi sosial untuk tingkat kesejahteraan Kecamatan Ngoro tidak ada perubahan sama sekali, akan tetapi pada tahun 2018 menurun menjadi 4310 pada Keluarga Pra Sejahtera dan penurunan dari 5465 menjadi 5515 pada Keluarga Sejahtera I dan meningkat dari 10924 menjadi 11047 pada Keluarga Sejahtera III dengan kenaikan penduduk 0,1%. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada peningkatan tingkat kesejahteraan pada Kecamatan Ngoro sebesar 0,98 % pada tingkat Keluarga Pra Sejahtera, dan terdapat kenaikan pada tingkat Keluarga Sejahtera III sebesar 1,01%.

3. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

1) UUPKS Kecamatan Ngoro

Program UPPKS di Kabupaten Jombang telah ada sejak tahun 1992 namun dengan nama Takesra, Takukesra yang kemudian berubah menjadi UPPKA pada tahun 1994 dan pada tahun 2000-an berganti nama menjadi UPPKS. Program UPPKS memiliki dasar hukum UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Dan terdapat Peraturan Kepala BKKBN Nomor 15/HK.010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

UPPKS di Kabupaten Jombang dikelola dan dikoordinasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan mitra kerja perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. UPPKS dikelola dalam Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Setiap kecamatan di Kabupaten Jombang memiliki kelompok UPPKS.

Kecamatan Ngoro dengan luas wilayah 4.986 km² memiliki jumlah penduduk 37.044 jiwa. Jumlah peserta KB pada Kecamatan Ngoro pada tahun 2018 sebanyak 11.609 jiwa dari total 14.444 Pasangan Usia Subur (PUS). Kecamatan Ngoro memiliki 7 (tujuh) Kelompok UPPKS yakni Ngoro, Kauman, Rejoagung, Kesamben, Banyuarang, Pulorejo, Jombok.

Pada awalnya pada tahun 2009 semua desa pada kecamatan Ngoro diberikan modal untuk kegiatan UPPKS dari BKKBN. Modal awal UPPK di Kecamatan Ngoro sebesar Rp. 500.000. Akan tetapi dari 13 desa di Kecamatan Ngoro hanya 7 desa yang masih aktif dan efektif melakukan kegiatan UPPKS yaitu desa Ngoro, Kauman, Rejoagung, Kesamben, Banyuarang, Pulorejo, Jombok.

Bentuk kegiatan UPPKS di tiap desa di Kecamatan Ngoro diberlakukan model simppinjam berkelanjutan, yaitu anggota memiliki hak untuk meminjam hanya satu kali dalam satu tahun dengan pengembalian 2 bulan, yang kemudian di berikan kepada anggota yang lain. Peminjaman modal dapat dilakukan hanya untuk keperluan usaha diantaranya warung kelontong, pembuatan kripik/kue, menjahit yaitu sebesar Rp. 250.000,-. Pada satu desa biasanya terdapat 10 – 25 anggota tergantung pada modal yang tersedia pada UUPKS Desa. Berikut kondisi UPPKS Kecamatan Ngoro sebagaimana tersebut di bawah ini :

Tabel 3
Kondisi Perkembangan UUPKS
Kecamatan Ngoro Tahun 2019

No	UPPKS Desa	Modal (jt)	Anggota
1	Ngoro	7	15
2	Kauman	5,7	14
3	Rejoagung	6	14
4	Kesamben	6	12
5	Banyuarang	5	10
6	Pulorejo	10	25
7	Jombok.	5,2	15
	Jumlah	44,9	105

Data diolah PKK Kecamatan Ngoro

Dari tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa dari modal yang diberikan oleh BKKBN pada tahun 2009 sebesar Rp. 500.000,- pada 13 Desa di Kabupaten Ngoro, hanya 7 Desa

yang dapat di kembangkan dan dapat digulirkan untuk pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat yaitu Ngoro, Kauman, Rejoagung, Kesamben, Banyuarang, Pulorejo, Jombok. Sedangkan desa di Kecamatan Ngoro yang gagal mengembangkan dana UPPKS adalah Genukwatu, Badang, Sidowarek, Kertorejo, Gajah, Sugihwaras.

Perbedaan pengembangan dana UPPKS yang berbeda dikarenakan keaktifan pengurus dan anggota dalam efektifitas kegiatan ekonominya. Seperti Pulorejo dapat menambahkan modalnya karena mendapatkan hadiah dari PKK Jawa Timur dalam kejuaraan lomba.

4. Deskripsi Analisis Hasil

- 1) **Uji Normalitas.** Dalam uji normalitas, penulis menggunakan hasil uji dari kolmogorof-smirnov test dengan model dihasilkan bahwa pada kolom variabel kemiskinan, pembangunan daerah dan Comdev UPPKS secara berurutan terdapat nilai kolmogorov-smirnov 1,666, 1,645 dan 1581 dengan nilai probalitas 0,08; 0,0,09; 0,14 Asym. Sig. (2-tailed). Persyaratan data disebut normal jika probabilitas atau $p < 0,05$ (lebih besar) pada uji normalitas dengan kolmogorov smirnov. Oleh karena nilai $p = 0,08; 0,0,09; 0,14$ atau $p < 0,05$, maka diketahui bahwa data variabel pelayanan publik, budaya organisasi dan kinerja pegawai adalah normal.
- 2) **Uji Multikolinearitas.** Dilihat dari nilai VIF yang dimiliki kedua variabel yaitu kinerja pegawai dan budaya organisasi, keduanya memiliki Nilai VIF kurang dari 10, yaitu 1,28, sehingga variabel pembangunan daerah dan Comdev UPPKS dapat disimpulkan tidak terjadi gejala Multikolinearitas.
- 3) **Uji Autokorelasi .** Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi atau tidak. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Jika nilai Durbin Watson hitung mendekati atau di sekitar angka 2 maka model terbebas dari asumsi klasik autokorelasi. Batas atas yang digunakan adalah $4-dl$ dan batas bawahnya $4-du$. Dari hasil tabel dengan $n=104$ dan $k=2$ diperoleh nilai $du=1,72$ dan $dl= 1,64$. Berdasarkan uji di atas tampak bahwa Durbin Watson hitung sebesar 2,066 terletak di daerah no autocorelation sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linier berganda terbebas dari asumsi klasik statistic autokorelasi.
- 4) **Uji Validitas .** Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 104 orang, maka nilai r table dapat diperoleh melalui $df = n-k$. dimana k merupakan jumlah butir pertanyaan dalam suatu variabel. Jadi $df=104-3= 101$, maka r table = 0,223. Butir pertanyaan dikatakan valid jika r hitung (0,985) yang merupakan nilai dari *corrected item, - total correlation* > r tabel.
- 5) **Analisis Hipotesa Regresi**

Tabel 4

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,555	,308	,302	,22629

Tabel model summary di atas menunjukkan bahwa nilai R yang merupakan simbol dari nilai koefisien korelasi adalah 0,555. Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa hubungan kedua variabel penelitian ada di kategori sedang. Melalui tabel ini juga diperoleh nilai R Square

atau koefisien determinasi (KD) yang menunjukkan seberapa bagus model regresi yang dibentuk oleh interaksi variabel bebas dan variabel terikat. Nilai KD yang diperoleh adalah 30,2% yang dapat ditafsirkan bahwa variabel bebas Pembangunan Daerah (X1) dan Comdev UPPKS (X2) memiliki pengaruh kontribusi sebesar 43% terhadap variabel Kemiskinan dan 57% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel Pembangunan Daerah (X1) dan Comdev UPPKS (X2), sebagaimana pada Anova pada Tabel 5.19.

Tabel 5
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,651	2	2,826	55,179	,000 ^a
	Residual	12,700	248	,051		
	Total	18,351	250			

a. Predictors: (Constant), Pemb_daerah, Comdev_UPPKS

b. Dependent Variable: Kemiskinan

Tabel Anova di atas menentukan taraf signifikansi atau linieritas dari sebuah regresi. Kriterianya dapat ditentukan berdasarkan uji F atau uji nilai Signifikansi (Sig.). Jika Nilai Sig. < 0,05, maka model regresi adalah linier, dan berlaku sebaliknya. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai Sig. = 0,00 yang berarti > kriteria signifikan (0,05), dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan artinya, model regresi linier sudah memenuhi kriteria linieritas. Dengan demikian terjadi pengaruh yang signifikan antara pembangunan daerah terhadap kemiskinan dan Comdev terhadap kemiskinan.

Tabel 6
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4,298	,299		14,397	,000		
Pemb_daerah	,033	,004	,550	9,200	,000	,781	1,280
Comdev_UPPKS	,037	,205	,011	,181	,856	,781	1,280

a. Dependent Variable: kemiskinan

Maka berdasarkan tabel 5,20 untuk hipotesis yang diajukan, maka untuk variabel X1 (pembangunan daerah) adalah, $0,000 < \text{probabilitas } 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H1 atau hipotesis pertama di terima. Sedangkan pada variabel X2 (Comdev UPPKS) adalah $0,856 > \text{probabilitas } 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H2 atau hipotesis kedua di tolak yang artinya tidak ada pengaruh Comdev UPPKS terhadap kemiskinan di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

Tabel coefficient diatas menginformasikan model persamaan regresi yang diperoleh dengan koefisien konstanta dan koefisien variabel yang ada di kolom *Unstandardized Coefficients B* tersebut maka dapat dituliskan bahwa persamaan regresi berganda yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = 4,298 + 0,33 X_1 + 0,37 X_2$$

Persamaan di atas mengandung arti sebagai berikut:

Konstanta atau a sebesar 4,298, artinya apabila tidak ada perubahan pada program pembangunan daerah dan comdev UPPKS maka kemiskinan di Kecamatan Ngoro akan tetap konstan sebesar 4,298.

Koefisien regresi untuk X_1 sebesar $b_1 = 0,33$, artinya setiap peningkatan kegiatan pembangunan daerah (X_1) akan berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang sebesar 0,33 satuan.

Koefisien regresi untuk X_2 sebesar $b_2 = 0,37$, artinya setiap peningkatan kegiatan Comdev UPPKS (X_2) akan berpengaruh terhadap kemiskinan di kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang sebesar 0,37 satuan. Dengan peningkatan UPPKS pada kelompok PKK sebagai program yang berupaya untuk membantu keluarga miskin dalam mengembangkan kegiatan kewirausahaan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Dukungan yang diberikan diantaranya adalah mendorong pemberdayaan masyarakat, dengan pemberian modal melalui simpan pinjam modal.

Pembahasan

Dalam rangka pelaksanaan penanganan kemiskinan, lebih menekankan pendekatan kesejahteraan yang menempatkan manusia sebagai subyek dalam sebuah model yang disebut "*People Centered*" sehingga sumber daya manusia menjadi lebih berdaya. Secara umum program pengentasan kemiskinan meliputi:

1. Pemberdayaan Manusia. Tujuannya adalah peningkatan SDM yang berorientasi pada:
 - a. Peningkatan keterampilan teknis dan manajerial guna mendukung penciptaan peluang usaha baru dan pengembangan usaha yang sudah ada.
 - b. Peningkatan mutu kehidupan keluarga miskin melalui perbaikan kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan lingkungan.
 - c. Ruang lingkup kegiatannya meliputi penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan partisipasi masyarakat yang terorganisir berdasarkan keswadayaan bersama (gotong royong).
2. Pemberdayaan usaha. Dengan tujuan utama pengembangan usaha ekonomi produktif dan peningkatan pendapatan kelompok miskin. Ruang lingkup kegiatannya meliputi pemberian pelayanan keuangan melalui Unit Pengelola Keuangan (UPK) bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa/Kelurahan, pengembangan permodalan usaha mikro, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat, peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis para pengusaha kecil, pengembangan kemampuan pemasaran produk, pembentukan jaringan kerja antar lembaga sosial ekonomi masyarakat, serta peningkatan hubungan antara usaha ekonomi masyarakat dengan lembaga keuangan dan permodalan.
3. Identifikasi Pemberdayaan Lingkungan. Komponen ini meliputi kegiatan kebutuhan sarana/prasarana pendukung sosial ekonomi, kebutuhan dasar Rumah Tangga Miskin (RTM) di bidang pendidikan, kesehatan dan fisik lingkungan, pembuatan rencana teknis pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan. Pemberdayaan lingkungan juga mencakup pengembangan sistem pemeliharaan sarana/prasarana secara mandiri oleh masyarakat sehingga dapat kelestarian manfaatnya. Selain itu di kembangkan pula konsep "Kader Pelestarian" lingkungan, yang akan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun dan memelihara prasarana lingkungan secara mandiri dan berkesinambungan.
4. Manajemen pendampingan, monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini meliputi penyusunan instrumen fasilitas pendampingan, pembimbingan langsung oleh Tenaga

Pendamping Masyarakat (TPM), kegiatan pemantauan, pengukuran kinerja dan evaluasi pelaksanaan program secara keseluruhan.

Mekanisme Pengelolaan Program

Mekanisme pengelolaan pengentasan kemiskinan meliputi beberapa tahapan sosialisasi, perencanaan, pencairan dana, pelaksanaan, pengendalian serta pertanggungjawaban dan pelestarian.

1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan tahapan penting dalam mendukung keberhasilan proses dan kegiatan program secara keseluruhan. Sosialisasi harus dimanfaatkan oleh semua pelaku program di semua tingkatan dan pada setiap saat atau kesempatan, guna mendorong partisipasi dan pengawasan dari semua pihak sehingga dapat mencapai hasil maksimal. Sosialisasi dapat dilakukan secara formal maupun informal melalui pertemuan-pertemuan di tingkat dusun/kelompok/ lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan, musyawarah desa (musdes), melalui media cetak, elektronik dan lain-lain sesuai kondisi lokal.

2. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahapan kegiatan setelah sosialisasi program yang dilakukan dengan tujuan menyusun usulan kegiatan secara partisipatif, membahas usulan, dan menetapkan alokasi anggaran. Rangkaian kegiatan perencanaan meliputi: pra-perencanaan; musdes perencanaan; penelitian usulan Desa/Kelurahan; Rakor KPK Kabupaten; dan Rakor KPK Propinsi.

3. Pencairan dana

Tahap akhir dari pengentasan kemiskinan adalah pencairan dana. Dalam proses tersebut, perlu adanya peranan dari berbagai pihak, agar tidak terjadi penyelewengan dan juga sebagai evaluasi atas pelaksanaan program yang ada.

Dari hasil penelitian di atas di dapat bahwa Comdev UPPKS (X_2) akan berpengaruh terhadap kemiskinan di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang sebesar 0,37 satuan yang tergolong berpengaruh rendah, dan uji t pada hipotesis yang menolak adanya hubungan Comdev UPPKS terhadap kemiskinan ini disebabkan karena kendala-kendala dalam pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kecamatan Ngoro, di antaranya:

1. Aspek Peningkatan Wawasan dan Pengetahuan

- a) Masih minimnya pembinaan kepada pengurus maupun anggota kelompok UPPKS yang disebabkan karena jarak yang terlalu jauh, waktu yang kurang tepat, dan kepentingan kepentingan lainnya.
- b) Pengelolaan administrasi dan keuangan kelompok yang belum terkelola dengan baik.
- c) Rendahnya wawasan dan pengetahuan dalam bidang pemasaran dan peningkatan daya saing produk.

2. Aspek Penerapan Gaya Kepemimpinan

- a) Adanya anggota kelompok yang tidak membayar angsuran modal, akan berdampak pada perputaran modal yang berkurang dan kecemburuan dari anggota lain yang setiap bulan mengangsur pinjaman modal yang diterimanya.
- b) Masih kurangnya jumlah pendamping kelompok UPPKS dalam mengembangkan usaha.

3. Aspek Pemberian Bantuan Modal dan Minimnya Bantuan ATTG (Alat Teknologi Tepat Guna) yang diterima.

Walaupun kontribusi kelompok UPPKS sebagai upaya pencapaian pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jombang belum tercapai atau terlaksana dengan baik, sejauh ini masih hanya memberikan dampak ekonomi pada peningkatan pendapatan masyarakat, dampak sosial

lingkungan sekitar dan dampak bagi pengembangan usaha yang sedang dikembangkan. Sedangkan untuk kontribusi secara keseluruhan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Jombang, namun memberikan pengaruh terhadap kehidupan perekonomian masyarakat Kabupaten Jombang.

KESIMPULAN

1. Bahwa ada pengaruh signifikan pada pembangunan daerah terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.
2. Bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan Comdev UPPKS terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Tidak adanya pengaruh program Comdev UPPKS di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang adalah disebabkan oleh aspek peningkatan wawasan dan pengetahuan; aspek penerapan gaya kepemimpinan serta aspek pemberian bantuan modal dan minimnya bantuan ATTG (Alat Teknologi Tepat Guna) yang diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M & Firmansyah, A. 2012. Critical Appraisal on Journal of Clinical Trial. The Indonesian Journal Medicine, 4(44): 337-343.
- Achmad Kuncoro, Engkus dan Riduwan. 2008. Cara Menggunakan dan Memakai Analisis Jalur. Bandung: Alfabeta.
- Ade Ermasari, 2009, Dinamika Kemiskinan Di Jawa-Madura Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2002-2007, Majalah Geografi Indonesia, UGM, Yogyakarta
- Adrian, Payne, 1993, The Essence of Services Marketing (Pemasaran Jasa), Andy, Yogyakarta.
- Agus Triyono, 2014, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Community Development Program Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga) PT. Holcim Indonesia Tbk Pabrik Cilacap, KomuniTi, Vol. VI, No. 2 September 2014, Universitas Muhammadiyah Solo
- Ala, Andre B. 1981. Strategi Anti Kemiskinan Lima Tahap. Analisa Tahun X, No. 9, September 1981
- Alfian, Mely G. Tan, Selo Soemardjan. 1980. Kemiskinan Struktural, Suatu Bunga Rampai. Jakarta: Yayasan Ilmu Persada
- Amalia, Wia Rizqi., Wahyudin Nor dan M. Nurdiansyah, 2014, Flypaper Effect pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan (2009 – 2013)
- Baswir, Revrison. 1997. Akuntansi Pemerintahan Indonesia. BPFE: Yogyakarta
- BKKBN. 2014. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana. Jakarta: Pusat Pendidikan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- Bratakusumah, Deddy Supriady & Riyadi. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Carminer, E. G., & Zeller, R. A., 1994. Reliability and Validity Assessment. In Michael Lewis-Beck. (Eds.). International Hand Book of Quantitative Application in the Social Sciences (Volume 4: Basic Measurement). London: Sage Publication.
- Chambers, Robert. 1983. Rural Development Putting the Last First. Longman Inc
- Cortina, J. M., 1993a. Interaction, Nonlinearity, and Multicollinearity: Implications for Multiple Regression. Journal of Management, 19(4), 915–922.

- Dwi Pratiwi Kurniawati, Bambang Supriyono, Imam Hanafi, (2016) Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. I, No. 4, Hal 9-14, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
- Faizatul Karimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie (2017), Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4, Hal. 597-602, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
- Friedman, J. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge: Blackwell.
- Geertz, C, 1986, *Mojokuto (Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa)*. Jakarta: PT Temprint
- Hersey dan Blanchard 2001. *Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resource*, Prentice Hall, New Jersey.
- Hidayat, A.A. 2007, *Metode Penelitian dan Teknik Analisa Data*, Penerbit Salemba Medika
- Huraerah, Abu, 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Bandung: Humaniora
- Ife, Jim. 2008. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irawan dan Suparmoko. 2007. *Ekonomika Pembangunan, Edisi Kelima*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. Yogyakarta: UGM
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1994. *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama
- Kenny, Susan, 1998. *Developing Communities for The Future*. Melbourne: An International Thomson Publishing Company
- Khodijah Mustaqimah, Sri Hartoyo, Idqan Fahmi, *Peran Belanja Modal Pemerintah dan Investasi Pembangunan Manusia dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, hlm. 1-15 Vol 6 No 2, Edisi Desember 2017, FEM IPB.
- M Chairul Basrun Umanailo 2019, *Integration of Community Empowerment Models [Pengintegrasian Model Pemberdayaan Masyarakat]*, [Proceeding of Community Development](#) is Licensed Under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#). Relawan Jurnal Indonesia, Universitas Samporna
- Malcom Payne and Gurid Aga Askeland, *Globalization and Int'l. Social Work: Postmodern Change and Challenge*, Ashgate, Burlington, VT., USA, 2008
- Malcom Payne, *Modern Social Work Theory*, 3th ed., Palgrave, Macmillan, NY., USA, 2005
- Malvin Delgado, *Community Social Work Practice in an Urban Context: The Potential of a Capacity-Enhancement Perspective*, Oxford University Press Inc, NY., USA, p.5.
- McIver, J.P. & Carminer, E.G. (1994). *Unidimensional Scaling*. In Michael Lewis-Beck. (Eds.). *International Hand Book of Quantitative Application in the Social Sciences (Volume 4: Basic Measurement)*. London: Sage Publication.

- Messick, S. (1995). Validity of Psychological Assessment, Validation of Inferences from Persons Respond and Performance as Scientific Inquiry into Score Meaning. *American Psychologist*, 741–749
- Muhammad Awaluddin Ardiansyah, Andi Djemma, Fajra Octrina (2017): The Impact of Community Based Environmental Planning (Plbk) Supported by National Program for Community Empowerment (Pnpm) Over Society's Behaviour and Welfare Tier, *European Journal of Research and Reflection in Management Sciences* Vol. 5 No. 4, 2017
- Munir. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Otonomi*. NTB, Bappeda
- Neny Susanti (2017), Pengembangan Community Based Economic Development Sebagai Upaya Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 (Studi Deskriptif Pada Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang). *Jurnal, Jurnal FISan* Vol. 3 No.2 2017, Universitas Airlangga Surabaya
- Nugroho, Iwan (2004), *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi Sosial dan Lingkungan/ Iwan Nugroho, Rochmin Dahuri*, Jakarta: LP3ES, 2004
- Priyono & Marnis (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sidoarjo: Zifatama Publisher
- Salim, Emil, 1986. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: LP3ES
- Siagian, Sondang P. 2004. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Sirojuzilam dan Mahalli, K. 2010. *Regional. Pembangunan, Perencanaan dan Ekonomi*. USU Press. Medan
- Sirojuzilam. 2005. *Regional Planning and Development. Wahana Hijau. Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Vol.1 Nomor 1 Agustus 2005
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta: Kanisius
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Pratama
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makroekonomi Modern*. Jakarta: PT Raja Drafindo Persada
- Sullivan, J.L., & Feldman, S. (1994). *Multiple Indicators: An Introduction*. In Michael Lewis-Beck. (Eds.). *International Hand Book of Quantitative Application in the Social Sciences (Volume 4: Basic Measurement)*. London: Sage Publication
- Sumantri (2000). *Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Fakultas Psikologi Unpad
- Sumarsono S. 2009. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta (ID): Graha Ilmu
- Sumodiningrat, Gunawan. *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2*, Andi Offset, Yogyakarta, 2004
- Syamsul Hadi dan Arief Noor Akhmadi (2018) *Institutional Role of Local Economic Development in Village Isolated Jember*, *Jurnal Agritop*, Universitas Muhammadiyah Jember
- Tikson, T. Deddy. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Makassar: Gemilang Persada
- Todaro MP, Smith SC. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta (ID): Erlangga.
- Todaro, Michael, 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka.